



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PEMBAHASAN EVALUASI PROLEGNAS 2015-2019 TERKAIT DENGAN  
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2020-2024 DAN  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

**TANGGAL 6 NOVEMBER 2019**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 6 November 2019.
Pukul	: 13.44 WIB s/d 15.17 WIB.
Tempat	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara	: Pembahasan Evaluasi Prolegnas 2015-2019 terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
Ketua Rapat	: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
Hadir Pimpinan	: 1. Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.; 2. Willy Aditya; 3. Drs. H. Ibnu Multazam.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 35 orang, ijin 5 orang dari 80 orang Anggota.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Evaluasi Prolegnas 2015-2019 terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum. pada pukul 13.44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Evaluasi Prolegnas 2015-2019 terkait penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 menyepakati/menyetujui bahwa :

1. Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 yang awalnya berjumlah 160 RUU dan seiring waktu bertambah menjadi 189 RUU, dengan jumlah RUU yang diselesaikan sebanyak 89 RUU yang terdiri dari 36 RUU Non Kumulatif dan 53 RUU Kumulatif Terbuka.
2. Capaian kinerja legislasi Periode Tahun 2015-2019 rendah dikarenakan :
  - a. Keterlambatan dalam penetapan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019,
  - b. Sebagian besar RUU yang ditetapkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahunan belum memiliki Naskah Akademik dan draf RUU,
  - c. Lemahnya koordinasi kelembagaan antara DPR-Presiden-DPD dalam pembentukan undang-undang,
  - d. Lemahnya koordinasi internal DPR antara alat kelengkapan,
  - e. Pelaksanaan tugas pemantauan dan peninjauan Undang-Undang oleh Badan Legislasi belum efektif dan memberikan dampak langsung terhadap penyusunan Prolegnas.
  - f. Perlunya konsistensi pemerintah untuk mengikuti pembahasan suatu RUU.
3. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 diharapkan lebih sedikit dan sederhana, tapi berkualitas dan bersinergi dengan program kerja Pemerintah.
4. Persyaratan masuknya suatu RUU dalam Prolegnas jangka menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 yang akan di *carry over* pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
6. Perlu dibentuk dan/atau dilakukan perubahan atas Peraturan DPR yang terkait dengan Tata Tertib, Tata Cara Penyusunan Prolegnas, Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, dan Pembentukan Undang-Undang.

## III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Evaluasi Prolegnas 2015-2019 terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-

2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 ditutup pukul 15.17  
WIB.

Jakarta, 6 November 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001